

# IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN BERAS PPKM 2021 UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DI KABUPATEN MUARA ENIM

Sindy Ratnasari

NPP: 29.0438

*Asdaf Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan*

*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: sindyratnasari1010@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *The Social Service is a regional apparatus organization that has the task of assisting the Regent in carrying out government affairs in the welfare of the local community. The problem that occurs is the decline in the level of community welfare due to the enactment of the 2021 PPKM which makes the local community's economy decline. Purpose: The purpose of this study is to find out the implementation of the 2021 PPKM rice distribution program for Beneficiary Families of Cash Social Assistance (BST) by the Social Service in Muara Enim Regency as social assistance in the form of rice during the COVID-19 pandemic, find out what factors are obstacles in the implementation and what efforts were made by the Muara Enim district social service to overcome obstacles in implementing the program as a form of social assistance in the form of rice during the covid-19 pandemic at the Muara Enim district social service.*

**Method:** *The research method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. Collecting data and information using interviews, observation, and documentation. While the data analysis technique is using data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

**Result:** *Based on the results of the research conducted by the researchers, it was concluded that the problem of implementing the rice distribution program as a form of social assistance during the COVID-19 pandemic at the Muara Enim district social service occurred during the distribution stage due to problems with the lack of valid data on the number of local residents who were entitled to receive it. the social assistance. Another obstacle is the lack of human resources in the social service, and the lack of public awareness of honesty, as well as the lack of cooperation with the kelurahan. As for the efforts made by the social service, namely increasing employee morale, adding personnel in distribution and establishing cooperation with the urban villages.*

**Keywords:** *Management, Implementation, Social Services.*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dinas social merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Permasalahan yang terjadi yaitu turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena berlakunya PPKM 2021 yang menjadikan perekonomian masyarakat setempat menurun. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui implementasi program penyaluran beras PPKM 2021 untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Dinas Sosial di Kabupaten Muara Enim sebagai bantuan sosial berupa beras pada masa pandemi covid-19, mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengimplementasian dan upaya apa yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten Muara Enim untuk mengatasi kendala dalam pengimplemntasian program sebagai bentuk bantuan sosial berupa beras pada masa pandemi covid-19 di dinas sosial kabupaten Muara Enim.

**Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dan informasi menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

**Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan implemntasi program penyaluran beras sebagai bentuk dari bantuan sosial pada masa pandemi covid-19 di dinas sosial kabupaten Muara Enim terjadi pada saat tahapan pendistribusian karena adanya kendala pada kurang validnya data jumlah penduduk setempat yang berhak menerima bantuan sosial tersebut. Hambatan lainnya yaitu kurangnya sumber daya manusia di dinas sosial, dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat akan kejujuran, serta kurangnya kerjasama dengan pihak kelurahan. Adapun upaya yang dilakukan oleh dinas sosial yaitu meningkatkan semangat pegawai, menambah personil dalam pendistribusian dan menjalin kerja sama dengan pihak kelurahan.

**Kata Kunci :** Implementasi, Beras PPKM 2021, Dinas Sosial.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Awal tahun 2020, *covid-19* menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini berawal dari *World Health Organization (WHO)*. Pada 31 Desember 2019 disebutkan bahwa ada kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus mengalami perkembangan sampai adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, *covid-19* ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD) oleh WHO. *Covid-19* ini dinyatakan dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet (percikan pernapasan), tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien *covid-19*<sup>1</sup>.

Pemerintah dengan segala upayanya untuk memperkecil angka penularan dan penyebaran *covid-19* terutama dalam menangani permasalahan ekonomi di Indonesia yang semakin mengalami penurunan, maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang berkenaan dengan *Refocussing* Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan virus *covid-19*.

Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Muara Enim terus berupaya untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi saat ini. Pada tahun 2020 lalu, pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan bantuan sosial berupa beras dengan menggunakan dana dari Kemensos bagi masyarakat yang membutuhkan dan untuk percepatan penanganan masyarakat yang terdampak *covid-19*.

Tahun 2021 pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan penyelenggaraan program penyaluran bantuan beras PPKM 2021 untuk Keluarga Penerima Manfaat, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Program ini dilakukan dalam rangka upaya memperkecil penyebaran dan penularan wabah *covid-19*, dengan memberikan bantuan beras 10 kg kepada KPM PKH (Program Keluarga Harapan) dan KPM BST (Bantuan Sosial Tunai) melalui CBP (Cabang Beras Pemerintah), hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban Keluarga Penerima Manfaat PKH dan BST pada saat PPKM di Kabupaten Muara Enim<sup>2</sup>.

Mulai tanggal 6 Juli 2021 sampai pada sekarang ini sudah dilakukan penyelenggaraan penyaluran BST pada 10 Kantor Pos di Kabupaten Muara Enim dengan jumlah 6.828 Keluarga Penerima Manfaat. Yang mana per-KPM menerima bantuan Rp300.000/bulan selama bulan Mei dan Juni.

Masyarakat yang dikategorikan masuk kedalam Keluarga Penerima Manfaat BST harus memiliki kriteria yang sesuai yang dinyatakan berhak menerima bantuan penyaluran beras PPKM 2021 ini. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus berupaya mengimplementasikan program ini agar tepat sasaran.

---

<sup>1</sup> 2020. "Sejarah Coronavirus : Seluk Beluk si Penyebab Wabah COVID-19". <https://genecraftlabs.com/id/sejarah-coronavirus-penyebab-wabah-covid-19/>. Diakses pada 27 Agustus 2021 pukul 14.20.

Ternyata dalam upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muara Enim masih ada kendala yang terjadi, seperti terjadinya tumpang tindih dalam penerimaan bantuan sosial, kendala jarak dalam pendistribusian bantuan, banyaknya data penerima bantuan sosial yang tidak valid, adanya pandemi Covid-19 yang menyulitkan pembagian bantuan sosial, Penolakan pembayaran BST dengan alasan tidak semuaarganya menerima, penerima yang datang tidak sama dengan daftar yang akan dilakukan penyaluran. Informasi ini diperoleh dari Regi Kurniawan, S.STP selaku Analis Tata Praja Dinas Sosial di Kabupaten Muara Enim.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan data penduduk yang dikategorikan dapat menerima bantuan sosial. Masyarakat di Kabupaten Muara Enim masih kurang tanggap dalam melaporkan jumlah penduduk yang terus mengalami perubahan. Sehingga pada saat pengimplementasian program penyaluran beras PPKM 2021 terjadi beberapa kendala. Hal ini terjadi karena data jumlah penduduk yang masih belum di-update ke data yang baru. Perubahan data penduduk ini terjadi karena tidak adanya pelaporan terkait masyarakat yang sudah meninggal dunia dan adanya kelahiran. Maka data menjadi tidak valid dan implementasi program penyaluran beras ini pun mengalami kendala dalam pembagian berasnya dan mereka yang bertugas harus cepat tanggap dalam menangani masalah tersebut.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan implementasi program penyaluran beras PPKM 2021 untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Muara Enim. Penelitian Handika Ramdhani berjudul *Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai Bantuan Sosial Berupa Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim*, menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya dinas sosial Kabupaten Muara Enim sudah menentukan rencana kerja dan menentukan siapa sajakah yang berhak dan pantas menerima bantuan sosial berupa sembako. Dan dinas sosial Kabupaten Muara Enim sudah memastikan bahwa semua pegawai dinas sosial sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing. Adapun faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial berupa sembako oleh dinas sosial Kabupaten Muara Enim yaitu kurangnya anggaran dalam pengelolaan belanja tidak terduga sebagai bantuan sosial berupa sembako, kurangnya SDM di Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk jujur. Faktor penghambat atau kendala yang terjadi tersebut harus ditindak lanjuti, maka Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi yaitu dengan cara memotivasi pegawainya untuk terus bersemangat, menambah jumlah personil dalam melakukan pendistribusian bantuan sosial berupa sembako tersebut, dan menjalin kerjasama yang baik dengan pihak kelurahan setempat.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Romauly Febriana Silitonga yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat*, peneliti tersebut mendapati hasil dari penelitiannya bahwa hasil implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bekasi dikategorikan ke dalam 2 (dua) fokus bidang, yaitu : bidang infrastruktur, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Kedua fokus bidang tersebut dijalankan dengan cukup baik dan sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan. Namun dari sisi lain, secara general faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut disebabkan oleh *cultural* masyarakat dan *structural* pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada seperti belum adanya payung hukum yang

secara rinci mampu mengurai masalah kemiskinan, serta bentuk program kebijakan yang masih bersifat pemberian bantuan sehingga belum ada strategi yang datang dari ketidakteraturan data penduduk miskin antar SKPD.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama masa pandemi covid-19 melalui implementasi program penyaluran beras PPKM 2021 untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Muara Enim yang merupakan program dari Kementerian Sosial yang dananya berasal dari dana APBN. Pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa implementasi dapat dikatakan berhasil apabila empat indikator diantaranya komunikasi, sumberdaya, sistem pelaksana, dan struktur birokrasi dilaksanakan dengan maksimal sehingga tercipta kepuasan masyarakat. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi program penyaluran beras PPKM 2021 untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam memecahkan kasus yang ada dan menggunakan metode deskriptif yang pada hakikatnya digunakan untuk mencari penyelesaian berdasarkan berita nyata dan teraktual dilokasi terkait. Selanjutnya dilaksanakan analisis sehingga didapatkan penjelasan yang akurat dan sistematis dalam rangka memecahkan studi kasus tersebut. Melalui metode deskriptif, peneliti akan memberikan gambaran secara sistematis dan terarah tentang fakta-fakta yang memang terjadi di lapangan. Metode deskriptif ini akan memudahkan peneliti dalam memahami hubungan yang terjadi di antara fenomena permasalahan yang sedang diteliti sehingga akan memberikan pemahaman secara terstruktur kepada peneliti tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Kasi Pendampingan dan Pemberdayaan Dinas Sosial, Analis Tata Praja Dinas Sosial, Lurah Muara Enim, Lurah Pasar 1, Lurah Pasar 2, 2 orang masyarakat Kelurahan Muara Enim, 2 orang masyarakat Kelurahan Pasar 1, dan 2 orang masyarakat kelurahan Pasar 2.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menganalisis implementasi program penyaluran beras PPKM 2021 untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Muara Enim menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa terdapat 4 indikator dalam menentukan keberhasilan dari

implementasi suatu inovasi yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut :

### **3.1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu variabel yang menunjang keberhasilan dari implementasi. Keberadaan komunikasi sangat bermanfaat baik dalam lingkup internal ataupun eksternal dari suatu organisasi. Komunikasi digunakan agar tercipta suatu keharmonisan dan koordinasi yang baik antar aparatur Dinas Sosial. Komunikasi yang baik dapat terukur apabila pesan dan informasi yang diutarakan dapat tersampaikan kepada pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim yang mengatakan bahwa "Implementasinya lancar, dalam tiap kelurahannya kelurahan Muara Enim yang menerima sebanyak 133 KPM, kelurahan Pasar I sebanyak 47 KPM, dan kelurahan Pasar II 38 KPM. Beras yang diberikan adalah sebanyak 10kg, yang pemasoknya disuplai dari Bulog Lahat, Sumatera Selatan. Kendala yang dihadapi pada saat melakukan implementasi adalah ketika ada masyarakat penerima BST yang telah dinyatakan meninggal atau pindah rumah. Tentu karena kurangnya koordinasi hal ini bisa menyebabkan miss komunikasi. Penyelesaian dari permasalahan ini adalah penerimaan beras tersebut harus diserahkan kepada walinya dengan adanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)." Artinya implementasi program penyaluran beras PPKM 2021 sudah dilaksanakan secara optimal dibuktikan dengan keberhasilan pihak Dinas Sosial dalam pelaksanaannya yang meskipun terdapat kendala yang dihadapi namun kendala tersebut dapat segera teratasi.

### **3.2. Sumber Daya**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi program penyaluran beras PPKM salah satunya yaitu sumber daya. Dalam hal ini sumberdaya yang terkait dengan pelaksanaan implementasi program yaitu staff yang berkompeten sesuai bidangnya, wewenang, informasi terkini, fasilitas yang memadai.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim yang mengatakan bahwa "Dampak munculnya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sangat dirasakan oleh masyarakat kecil yang berada di kabupaten Muara Enim, para anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Muara Enim sangat peka terhadap apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Sehingga dalam pelaksanaan program Kemensos dalam penyaluran beras PPKM 2021 ini beras para aparatur dikerahkan untuk menyukseskan implementasi programnya. Dengan pelaksana tugasnya yaitu pendamping beras tiap kecamatan masing-masing satu orang untuk 22 kecamatan, dan satu orang korda (koordinator)."

Dilihat dari pemberian tanggung jawab terhadap keberlangsungan implementasi penyaluran beras PPKM 2021 bagi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) dapat dikatakan bahwa pembagian tugas dan tanggungjawab sudah dilakukan secara adil sesuai dengan tupoksi dari setiap pegawai.

### **3.3. Sikap Pelaksana (Disposisi)**

Dalam implementasi program penyaluran beras PPKM 2021 ini Kasi Pendampingan dan Pemberdayaan Dinas Sosial dalam wawancaranya menjelaskan prosedur dari pengimplementasian penyaluran beras PPKM yang mengatakan bahwa, “Dalam prosedur penyaluran beras PPKM 2021 ini aparatur yang ditugaskan dapat memberikan sikap yang baik dalam memberikan pelayanannya dalam pengimplementasian program ini. Yang prosedurnya dimulai dari menerima data dari Bank Himbara pusat yang kemudian disampaikan kepada Bank Himbara cabang dan dikoordinasikan kepada Korda (Koordinator Daerah) dan kemudian diteruskan ke pendamping tiap kecamatan. Setiap KPM melakukan transaksi pembelian e-warong di wilayah KPM dengan cara menggesek kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) pada EDC (Electronic Data Capture) dengan saldo KPM 200.000/bulan.”

Dilihat dari hasil wawancara ini, pada saat pengimplementasian program penyaluran beras PPKM 2021 ini dapat dilakukan dengan lancar, karena para aparatur yang ditugaskan telah mengemban tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab dan sangat merangkul masyarakat.

### **3.4. Struktur Birokrasi**

Penerapan implementasi program penyaluran beras ini bisa dikatakan berhasil. Struktur birokrasi program penyaluran beras PPKM telah disusun oleh pimpinan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim yang mengatakan bahwa, “Struktur birokrasinya itu sudah sedemikian rupa diatur oleh pihak pimpinan. Kami hanya menuruskan langsung perintah dari atas dan kemudian membentuk tim untuk melaksanakan program penyaluran beras tersebut. Untuk mekanisme strukturnya itu hanya dari pihak di atas. Para pegawai dinas sosial saat ini sudah ditempatkan sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka masing-masing, kami menempatkan mereka pada posisi mereka saat ini berdasarkan pengalaman mereka dalam bekerja dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan suatu pekerjaan serta kinerja mereka selama ini. Selama mereka bekerja pun kami tidak pernah menerima laporan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam bekerja akibat salah penempatan posisi dalam melakukan tugas, mereka bekerja dengan semangat yang tinggi selama ini dan tidak pernah mengeluh terhadap pekerjaan yang mereka lakukan.”

Kepala dinas sosial ketika peneliti mengajukan pertanyaan, apakah pegawai sudah ditempatkan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing dan apakah ada keluhan dari pegawai dinas sosial yang menyatakan bahwa mereka menempati posisi yang kurang tepat dengan keahlian yang mereka miliki dalam bekerja selama ini. Kepala dinas sosial mengatakan bahwa para pegawai dinas sosial sudah ditempatkan berdasarkan keahlian mereka masing-masing, dan dia tidak pernah menerima laporan dari para pegawai bahwa mereka menempati posisi yang salah dalam bekerja.

Pernyataan kepala dinas sosial tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Sekertaris dinas sosial yang mengatakan bahwa, “Pegawai dinas sosial kabupaten Muara Enim semuanya sudah ditempatkan berdasarkan keahlian mereka masing-masing berdasarkan latar belakang mereka dalam bekerja selama ini. Sampai saat ini kami tidak pernah menerima laporan dari pegawai kami bahwa mereka menduduki posisi yang kurang tepat dengan keahlian yang mereka miliki masing-masing, jangan kan mereka berbicara seperti hal tersebut, mereka bahkan tidak pernah berbicara bahwa mereka ingin menduduki posisi yang lain dalam bekerja, semua itu terjadi karena mereka benar-benar nyaman dengan posisi pekerjaan mereka saat ini.”

Sehingga menurut sekretaris dinas sosial mengatakan bahwa seluruh pegawai dan aparatur yang bekerja di dinas sosial kabupaten Muara Enim sudah ditempatkan sesuai keahlian mereka masing-masing, mereka yang ditempatkan di posisi mereka saat ini memang sudah memiliki latar belakang yang benar-benar sudah berhubungan dengan pengalaman mereka dalam bekerja selama ini.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peneliti menemukan faktor penghambat dalam implementasi program penyaluran beras PPKM 2021 untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Muara Enim yaitu adanya data yang tidak valid dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat setempat dalam melaporkan jumlah masyarakat yang ter-update inilah yang menjadikannya kendala dalam pengimplementasian program penyaluran beras PPKM 2021. Karena terdapatnya data yang tidak jelas sehingga menyebabkan adanya tumpang tindih dalam pemberian jumlah bantuan beras ini. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah karena kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.

## **IV. KESIMPULAN**

Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan Program Penyaluran Beras PPKM 2021 Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Muara Enim sudah berjalan dengan baik. Mulai dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah tersusun dengan sebagaimana mestinya. Hanya saja ada beberapa kendala yang membuat implementasi ini menjadi terhambat. Faktor-faktor penghambatnya yaitu adanya Data yang tidak valid, kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial, dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat akan kejujuran.

Menyikapi Faktor Penghambat tersebut, maka yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam menyikapi persoalan tersebut adalah dengan meningkatkan semangat pegawai, menambah personil dalam pendistribusian, dan menjalin kerja sama dengan pihak kelurahan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward III.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program penyaluran beras sebagai suatu bentuk bantuan sosial pada masa pandemi covid-19 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.



Dadang Suwanda. (2014). *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah* (p. 38). Jakarta Pusat : PPM.

Hesel Nogi S dan Tangkilisan. (2003). *kebijakan publik yang membumi*. Yogyakarta : YPAPI dan Lukman Offset.

Moenir, A. . (2008). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.

Subarsono, A. G. (2006). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi. In *History Today* (Vol. 52, Issue 6, p. 138). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafe'ei, I. K. (1999). *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta : PT. Pertja.

Creswell John W. *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*. Singapore University Of Nebraska-Lincoln, 2007.

Simangunsong, Fernandes. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Nawari Ismail. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta. Samudera Biru. 2015).

C. R. Kothari, *Research Methodology Method and Techniques*, 37.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet.13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, 157.

Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984 ), 361.

Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

Kumar and Rajit, *Research Methodology: A Step By Step Guide For Begginers*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137.

Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta Selatan: GP. Press Group, 2013), 199.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 246.

Hudori, Muhammad. 2021. "Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta". <https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta?page=all>. Diakses pada 27 Agustus 2021 pukul 13.05.

2020. "Sejarah Coronavirus : Seluk Beluk si Penyebab Wabah COVID-19". <https://genecraftlabs.com/id/sejarah-coronavirus-penyebab-wabah-covid-19/>. Diakses pada 27 Agustus 2021 pukul 14.20.

2021. “Ini Dampak Ekonomi jika PPKM Darurat Diperpanjang hingga 6 Minggu”. <https://money.kompas.com/read/2021/07/13/111500426/ini-dampak-ekonomi-jika-ppkm-darurat-diperpanjang-hingga-6-minggu>. Diakses pada 27 Agustus 2021 pukul 15.40.

2021. “HNU Launching Pelepasan Bantuan Beras PPKM 2021, Untuk Keluarga Penerima Manfaat, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST)”. [https://www.muaraenimkab.go.id/web/detail\\_berita/1875](https://www.muaraenimkab.go.id/web/detail_berita/1875). Diakses pada 27 Agustus 2021 pukul 16.00.

Nuradhawati, R. (2019). Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia Rira Nuradhawati. *Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia*, 2(1), 152–170.

Subarsono, A. G. (2006). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi. In *History Today* (Vol. 52, Issue 6, p. 138). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.2307/j.ctvm20203.13>

